

ABSTRAK

Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah PMK Nomor 168 Tahun 2023. Dibimbing oleh: Frankie J. H. Taroreh, S.E., M.M. dan Ignatia R. Honandar, S.E., M.Sc

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang penting dan menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk mendanai kegiatan pemerintah. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keadilan perpajakan, pemerintah seringkali melakukan perubahan dan harmonisasi peraturan perpajakan. Salah satu peraturan perpajakan terkini adalah Peraturan Menteri (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, yang mengatur harmonisasi perpajakan di Indonesia dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. Di Indonesia, sistem perpajakan telah mengalami berbagai perkembangan dan reformasi seiring dengan dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas jasa, atau kegiatan orang pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan dan perbedaan dalam perhitungan terkait kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah PMK Nomor 168 Tahun 2023.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada beberapa langkah analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, deskripsi data mentah, reduksi data, kategorisasi data, dan hubungan antar kategori.

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tarif efektif yang diatur dalam PMK No. 168 Tahun 2023 mempermudah proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi. Karyawan dengan penghasilan lebih rendah dapat menikmati tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak memiliki kewajiban pajak. Sementara itu, karyawan dengan penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih besar. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak, dengan membebaskan beban pajak yang lebih besar kepada karyawan yang berpenghasilan lebih tinggi.

Kata Kunci: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, Harmonisasi Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21

ABSTRACT

A Comparative Analysis of Income Tax for Individual Taxpayers Before and After the Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023. Supervised by: Frankie J. H. Taroreh, S.E., M.M. and Ignatia R. Honandar, S.E., M.Sc

Tax is an important source of state revenue and is one of the fiscal policy instruments to fund government activities. In an effort to improve tax efficiency and fairness, the government often makes changes and harmonization of tax regulations. One of the latest tax regulations is Ministerial Regulation (PP) Number 58 of 2023 concerning the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 168 of 2023, which regulates tax harmonization in Indonesia and has been effective since January 1, 2024. In Indonesia, the taxation system has undergone various developments and reforms along with the dynamics of the economy, social, and politics. The Minister of Finance Regulation (PMK) Number 168 of 2023 regulates instructions for implementing tax deductions on services or activities of individuals. The purpose of this study was to analyze changes and differences in calculations related to tax obligations that must be paid by individual taxpayers before and after the Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023.

The method used in this study was a descriptive method. The type of data that used in this study was secondary data. The technique used to collect the data was by using documentation technique. The data analysis technique used in this study included the steps of qualitative data analysis, which are data collection, description of raw data, data reduction, data categorization, and the relationship between categories.

The results and conclusions of this study indicated that the application of effective rates regulated in the Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023 simplifies the process of calculating Article 21 Income Tax for individual taxpayers. Employees with lower incomes can enjoy lower tax rates or even have no tax obligations. Meanwhile, employees with higher incomes are subject to higher tax rates. This aims to achieve justice and equity in tax collection, by imposing a greater tax burden on employees with higher incomes.

Keywords: The Minister of Finance Regulation (PMK) Number 168 of 2023, Tax Harmonization, Income Tax Article 21

This translation has been checked and proven accurate.



Rafael H. Y. Sengkey, S.S., M.Pd.
*Head of Language Development Office
Universitas Katolik De La Salle Manado*

